

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Revolusi Industri merupakan bukti nyata bahwa teknologi telah berhasil mempengaruhi perkembangan industri dan gaya hidup masyarakat (Dewi & Agarta, 2023). Revolusi Industri berkembang yang awal mula menciptakan barang dengan tangan menjadi dengan memanfaatkan mesin dan hingga menggunakan teknologi komputerisasi. Setiap tahapan Revolusi Industri memiliki fokus yang berbeda, dari Revolusi Industri 1.0 hingga Revolusi Industri 5.0. Revolusi Industri 1.0 yang mengubah peradaban manusia pada masa itu dengan ditemukannya mesin uap, disusul oleh Revolusi Industri 2.0 dengan ditemukannya tenaga listrik, dan Revolusi Industri 3.0 yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan elektronika otomatis (Annisa, 2021). Revolusi Industri 4.0 berfokus pada sistem komputerisasi, tetapi Revolusi Industri 5.0 berfokus pada bagaimana menggunakan teknologi untuk mempercepat pekerjaan demi kesinambungan dan kesejahteraan manusia (Siagian, 2023).

Menurut Siagian (2023) konsep Revolusi Industri 5.0 tidak hanya menonjolkan pada sebuah teknologi saja, tetapi juga dengan peran manusia. Revolusi Industri 4.0 didasarkan pada otomatisasi, robot, internet, rantai pasokan global, dan data besar yang berasal dari informasi internet, tetapi pada Revolusi Industri 5.0 atau disebut juga dengan *Society 5.0* didasari pada big data yang diperoleh dari sensor, dihubungkan melalui Internet, dianalisis menggunakan

kecerdasan buatan, dan digunakan untuk kepentingan masyarakat (Rajasekera, 2022). Karena salah tujuan dari Industri 5.0 adalah membantu meningkatkan kualitas hidup manusia dengan memperluas akses terhadap peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta memfasilitasi pembangunan kota pintar atau *Smart city* yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Konsep *Smart city* yang erat kaitannya dengan Revolusi Industri berupaya meningkatkan kualitas kehidupan perkotaan dengan memanfaatkan teknologi dan data (perkim, 2021).

Istilah “*Smart city*” mengacu pada konsep yang menggabungkan peran komunitas atau masyarakat dengan teknologi informasi dalam memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada (Kurniawan & Andiyana, 2021). *Smart city* menjadi gagasan yang mengkolaborasikan peran masyarakat dengan pemanfaatan teknologi yang terus berkembang. Menurut Sagara (2021) IBM (*International Business Machines Corporation*) adalah perusahaan teknologi terkenal yang pertama mengadopsi kata tersebut pada tahun 1998, namun mulai mendapatkan popularitas pada tahun 2000 an dengan konsep pemanfaatan semua teknologi dan informasi yang tersedia untuk menjalankan dan memaksimalkan sumber daya yang terbatas. Konsep *Smart city* menjadi tren di berbagai negara di dunia. *Smart city* menjadikan tata kelola pada kota menjadi efektif karena kebijakan publik yang ada pada sebuah kota terhubung dengan teknologi yang ada. Dalam *Smart city Index* (SCI) yang merupakan penilaian yang dilakukan *Institute for Management Development* (IMD) yang berkolaborasi dengan Singapore University for Technology and Design (STUD) merilis 5 kota yaitu

Singapura, Zurich, Oslo, Taipei City, dan Lausanne yang menjadi kota terbaik dalam penerapan *Smart city* (Dzulfaroh, 2022).

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mencanangkan Gerakan 100 *Smart city* sebagai respons terhadap tren *Smart city* di Indonesia, dengan tujuan mencapai cita-cita kota yang layak huni, aman, dan nyaman pada tahun 2025 (Widiyastuti, 2019). *Smart city* di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 2022 tentang Perkotaan dalam Mendukung Implementasi Kota Cerdas. Di Indonesia ada tiga kota yang masuk dalam *Smart city Index (SCI) 2023* yaitu Jakarta dengan urutan 102, Medan dengan urutan 112, dan Makassar dengan urutan 114 (Salsabila, 2023). Jakarta dan Medan memenuhi kebutuhan sanitasi daerah miskin, menawarkan daur ulang, transportasi umum, dan akses informasi pemerintah. Sedangkan Makassar berhasil dalam menawarkan pemesanan janji temu online dan kenyamanan transportasi umum.

Keinginan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan, peningkatan layanan publik, dan penggunaan teknologi untuk membangun masyarakat yang lebih cerdas dan terhubung mendorong penerapan program *Smart city* di seluruh Indonesia. Dalam penelitian Yusuf (2022) Kunci membangun *Smart city* pada suatu daerah bukanlah teknologi, melainkan bagaimana inovasi dihasilkan. Inovasi yang dihasilkan dari pemikiran masyarakat pada suatu daerah akan membangun kota tersebut sesuai dengan kondisi yang ada. Inovasi dibuat dengan memperhatikan beberapa dimensi yang ada pada konsep *Smart city*. Menurut Insani (2017) dikutip dalam (Wahid & Amalia, 2020) *Smart city* terbagi

atas enam dimensi utama yaitu *smart government* (pemerintahan cerdas), *smart economy* (ekonomi cerdas), *Smart society* (kehidupan sosial cerdas), *smart mobility* (mobilitas cerdas), *smart environment* (lingkungan cerdas), dan *smart living* (lingkungan cerdas). Pada penelitian ini berfokus pada dimensi *Smart society*, karena konsep *Smart society* menitikberatkan manusia sebagai peran utama. Secanggih apapun teknologi yang ada, apabila manusia tidak berperan maka tidak akan menghasilkan sebuah inovasi pada suatu kota.

Smart society adalah strategi cerdas untuk mengembangkan kota impian yang "integralistik atau terintegrasi" untuk menjawab tantangan kota yang semakin kompleks seiring pertumbuhan populasi manusia yang berbanding lurus dengan kebutuhan ekonomi dan non-ekonomi mereka (Anshory & Harisandi, 2018). Dengan terobosan teknis yang ada, *Smart society* berfokus pada manusia sebagai elemen utama sebuah kota, di mana interaksi antar warga semakin kuat dan tanpa batas. *Smart society* memiliki tiga komponen yaitu interaksi masyarakat yang efisien (*community*); lingkungan pendidikan yang efisien (*learning*); dan sistem keamanan masyarakat (*security*) (Gayatri & Ernady, 2022). Interaksi antar masyarakat dibutuhkan dalam pengimplementasian *Smart society*. Masyarakat sebagai pelaku utama tidak dapat berdiri sendiri dibutuhkan interaksi antar dua manusia atau lebih agar dapat mewujudkan efisiensi waktu. Untuk mewujudkan hal tersebut juga dibutuhkan sebuah pendidikan bagi masyarakat agar *Smart society* dapat dijalankan dengan efisien. Dalam penerapan *Smart society*, sistem keamanan masyarakat sangat dibutuhkan bagi menjaga data masyarakat. Penerapan *Smart society* sangat lekat dengan

teknologi yang mencakup berbagai data dari masyarakat dan pemerintah. Maka diperlukan sebuah sistem keamanan yang baik.

Masyarakat yang cerdas dapat mengimplementasikan *Smart city* dengan baik, agar mencapai tujuan dan sasaran yang tepat. Di Indonesia terdapat Gerakan Menuju 100 *Smart city* sebagai wujud implementasi kebijakan *Smart city* yang diinisiasi oleh Kementerian Kominfo, Kemenpan RB, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, Kemenko Perekonomian, dan Kantor Staf Presiden (KSP). Program ini dimulai pada 2017 sebagai percontohan dalam menyusun rencana induk *Smart city* dan implementasinya (Rizkinaswara, 2022). Kabupaten Bantul menjadi salah satu daerah yang terpilih untuk mengimplementasikan gerakan tersebut. Kabupaten Bantul menerima *award Smart city* pada tahun 2021 dalam kategori *Smart society*. Pada tahun yang sama Kabupaten Bantul merilis aplikasi Bantulpedia. Kabupaten Bantul selaku pemerintah daerah menyediakan sarana bagi masyarakat Bantul untuk mengakses layanan publik dengan sebuah aplikasi digital. Bantulpedia adalah aplikasi yang berisi berbagai layanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dan informasi terkait Kabupaten Bantul. Pada Bantulpedia mengandung beberapa komponen *Smart society* yaitu komunitas, learning, dan security. Pada fitur yang ada pada Bantulpedia tersedia layanan publik yang memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan Pemerintah Kabupaten Bantul seperti pada layanan Lapor Bantul. Lapor Bantul memungkinkan masyarakat Bantul untuk melakukan pengaduan dan aspirasi terhadap apa yang sedang terjadi pada lingkungan mereka. Selain itu pada

Bantulpedia tersedia berbagai Informasi Publik seperti berita, event, dan iklan layanan yang akan menambah pengetahuan masyarakat Bantul secara efisien.

Implementasi Bantulpedia oleh masyarakat Bantul masih rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah pengguna Bantulpedia saat ini hanya sekitar 10rb pengguna. Dibandingkan dengan jumlah keseluruhan masyarakat Bantul yang berjumlah 1.078.404 jiwa, ini terbilang sedikit (play store). Karena hanya 0,93% dari masyarakat Bantul yang tahu dan menggunakan aplikasi tersebut. Minimnya penggunaan Bantulpedia berkaitan kurang tauhan masyarakat terhadap aplikasi tersebut. Hal tersebut sangat disayangkan karena dalam aplikasi Bantulpedia baik digunakan sebagai rujukan masyarakat dalam menggunakan layanan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan melalui Bantulpedia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dalam penelitian skripsi ini di rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor yang mempengaruhi implementasi *Smart city* melalui Bantulpedia di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul tahun 2022-2023?
2. Bagaimana implementasi *Smart society* pada aplikasi Bantulpedia di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul tahun 2022-2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dijelaskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi implementasi *Smart city* melalui Bantulpedia di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul tahun 2022-2023.
2. Menjelaskan implementasi *Smart society* pada aplikasi Bantulpedia di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul tahun 2022-2023.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat menjadikan bahan rujukan dalam mengembangkan teori *Smart society*, khususnya pada analisis partisipasi dalam sebuah aplikasi yang berbasis *Smart city*.

2. Manfaat Praktis

- a. Meningkatkan pelayanan publik yang ada dalam berbagai fitur di dalam Bantulpedia dengan memanfaatkan teknologi dan data;
- b. Meningkatkan efisiensi dalam sistem tata kelola perkotaan di Kabupaten Bantul melalui penggunaan jaringan;
- c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian akses layanan dan informasi berbasis teknologi.

E. Tinjauan Pustaka

Saat ini peradaban manusia telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang memunculkan konsep *Smart city* yang bertujuan menjadikan Makassar sebagai Kota Dunia dengan mengembangkan konsep berbasis penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan kota (Nurdiassa et al., 2021). Konsep teknologi informasi dan komunikasi sangat erat kaitannya dengan *Smart city*, adanya teknologi informasi dan komunikasi menjadikan sebuah kota menjadi kota yang cerdas dalam memberikan sebuah layanan publik. Menurut Mursalim (2017), *Smart city* (kota pintar) adalah gagasan kota cerdas yang dimaksudkan untuk membantu berbagai aktivitas masyarakat dan memungkinkan akses cepat terhadap informasi bagi masyarakat.

Konsep *Smart city* dapat membantu masyarakat mengelola sumber daya yang ada secara efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga dalam menjalankan aktivitasnya atau mengantisipasi kejadian yang tidak terduga (Suhartono et al., 2019). Dalam penelitian Sukmatama et al, (2019) untuk mengimplementasikan *Smart city*, perlu memperhatikan enam indikator dasar yaitu *smart mobility*, *smart people*, *smart living*, *smart government*, *smart environment*, dan *smart economy* yang masing-masing memiliki beberapa sub-indikator yang menjadi tolok ukur pelaksanaan *Smart city* dan menghasilkan *Smart city* yang sesuai dengan sub-indikator. Namun jika dicermati potensi kota-kota di Indonesia contohnya Kota Palu lebih dalam, akan terlihat ada berbagai komponen tambahan yang mungkin bisa menjadi komponen *Smart city*, seperti *smart culture* dan *smart Disaster Management*, mengingat Indonesia memiliki

budaya yang berbeda dan potensi bencana yang sangat besar (Ikhwan & Sutriadi, 2016)

Dalam penelitian Arafah & Winarso (2020) meskipun konsep *Smart city* masih didominasi oleh teknologi informasi dan komunikasi, serta komputer dan teknik, namun saat ini pembahasan mengenai *Smart city* di bidang sosial sangat diperlukan, karena pengembangan konsep *Smart city* terus berfokus pada masyarakat dan aspek yang ada di dalamnya, salah satunya adalah bagaimana manusia berpartisipasi sebagai pengguna. Masyarakat sebagai pelaku utama dalam implementasi *Smart city* sangat perlu diperhatikan, karena komponen masyarakat tidak dapat digantikan dengan komponen lain. *Smart city* menjadi tujuan untuk mengembangkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang cerdas, dengan pertanian dan pariwisata sebagai penggerak utamanya, yang didukung oleh teknologi informasi (Astuti & Cahyadi, 2018). Menurut Widiyastuti (2019) kelembagaan, teknologi, dan manusia merupakan faktor dari keberhasilan *Smart city* yang di inisiatif oleh berbagai pemerintah daerah di Indonesia dengan berbagai tujuan strategis, tetapi kondisi saat ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mempunyai komponen yang utama dalam sebuah sistem untuk memahami tujuan dan strategi menuju *Smart city*.

Pemerintah Kota Tangeling mensosialisasikan program *Smart city* berbasis inovasi teknologi komunikasi dan informasi, namun upaya tersebut belum maksimal, karena pengetahuan masyarakat terhadap konsep *Smart city* belum merata sehingga pemanfaatan inovasi teknologi dalam program *Smart city* belum merata dan belum mampu meningkatkan pelayanan publik secara optimal (Wahid

& Amalia, 2020). Penelitian yang dilakukan Janoskova et al, (2021) menghasilkan implementasi aplikasi di perkotaan akan membantu transformasi menuju *Smart city* karena mampu mengidentifikasi kebutuhan spesifik warganya, dan aplikasi tersebut juga akan menggabungkan beberapa solusi cerdas, seperti pengumpulan suara online; penyampaian permintaan dan pengaduan; pembayaran, pajak, dan tiket elektronik; berkomunikasi langsung dengan pemerintah kota bila diperlukan. Untuk mewujudkan *Smart city* di wilayah Provinsi Sumatera Utara diperlukan kesamaan paradigma dan peraturan mengenai *Smart city*, serta kerjasama berbagai pihak sebagai wujud pelayanan publik kepada masyarakat (Hasibuan & Sulaiman, 2019).

Implementasi *Smart society* dalam pembuatan atau pengembangan aplikasi *Smart city* seperti *Jogja Smart Service (JSS)* akan memberikan sebuah pelayanan yang teratur dan tertata rapi pada masyarakat (Radjikan & Pramesti, 2022). Hal tersebut didukung pada penelitian Ramadhani et al, (2020), bahwa Aplikasi *Jogja Smart Service (JSS)* diyakini layak menjadi utilitas publik kelas satu. Pemerintah Kota Yogyakarta menghadirkan aplikasi *Smart city* untuk membantu masyarakat dan institusi pemerintah dalam menjalankan tugasnya dengan lebih mudah, karena dapat mentransformasi tata kelola pemerintahan Kota Yogyakarta sehingga pelayanan publik dapat diperoleh secara efektif dan efisien (Aisyahh et al., 2020). Pemerintah Kabupaten Purworejo membangun *Smart city* dengan menggunakan *Garuda Smart city Model (GSCM)*, yang wilayah pelayanannya meliputi *smart economic*, *Smart society*, dan *smart environment*,

dengan bertajuk *cyber* kota untuk mendorong terselenggaranya pemerintahan kota yang lebih efektif dan efisien (Murhadi & Jumasa, 2019).

Pada penelitian Anshory & Harisandi, (2018) menyatakan bahwa konsep *Smart society* adalah pendekatan cerdas untuk menciptakan kota impian yang “integralistik atau terintegrasi” untuk mengatasi tantangan kota yang lebih rumit seiring dengan pertumbuhan populasi yang berbanding lurus dengan kebutuhan ekonomi dan non-ekonomi. *Smart society* yang berarti penduduk atau masyarakat kota yang cerdas, mengacu pada pendidikan seseorang serta kualitas hubungan sosial yang dikembangkan (Anam et al., 2021). *Smart society* dalam proses pembelajaran digital didukung dengan Knowledge Management System (KMS) dengan fitur klasifikasi standar yaitu Knowledge capture dan Knowledge Sharing (Wardhana et al., 2020).

Implementasi *Smart city* pada dimensi *Smart society* di Kota Bandung yang dipengaruhi oleh sepuluh variabel yaitu pengembangan manajemen pendidikan berbasis teknologi yang berkarakter, pengembangan sistem keamanan yang kolaboratif dan didukung teknologi, *smart transportation*, pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial, interaksi sosial masyarakat, *smart community*, bantuan sosial masyarakat terintegrasi ICT, peningkatan hubungan sosial, *smart education*, dan sistem manajemen keamanan menggunakan *Internet of Things* (IoT) masih dikatakan rendah (Gayatri & Ernady, 2022). Hal tersebut menandakan masyarakat sebagai pelaku yang memiliki peran besar belum dapat menjalankan sebuah program. Masyarakat masih perlu dibekali beberapa aspek bidang keilmuan dan pengetahuan yang benar, karena sangat diperlukan masyarakat yang

cerdas agar dapat membangun sistem masyarakat yang manusiawi dan dinamis. Pada penelitian Kurniawan & Andiyan (2021) konsep *society 5.0* menekankan pada peran manusia yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penggunaan teknologi, meningkatkan kesadaran akan pentingnya kecerdasan masyarakat dalam penerapan konsep *Smart city* secara efektif. Berikut tabel penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam topik penelitian:

Tabel 1 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Tulisan	Hasil dan Kesimpulan
1.	Nurdiassa et al, (2021)	Implementasi Kebijakan <i>Smart city</i> dalam Mewujudkan Makassar Kota Dunia https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/JPAG/article/view/114	Perkembangan zaman telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Saat ini peradaban manusia telah memasuki era revolusi industri 4.0 dengan berbagai kemajuan teknologi. Hal ini merupakan terobosan baru yang dimanfaatkan Kota Makassar untuk memberikan pelayanan maksimal bagi warganya. Maka munculah konsep <i>Smart city</i> untuk mewujudkan Makassar sebagai Kota Dunia. Konsep-konsep tersebut berkembang berdasarkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan kota
2.	Mursalim, (2017)	Implementasi Kebijakan <i>Smart city</i> di Kota Bandung https://www.academia.edu/download/73183703/pdf_1.pdf	Kebijakan <i>Smart city</i> belum cukup baik dalam disosialisasikan atau dikomunikasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung, khususnya instansi pemerintah. Selain itu, masih banyak masyarakat Kota Bandung yang belum mengetahui tentang <i>Smart city</i> . Sosialisasi inisiatif <i>Smart city</i> merupakan sebuah proses panjang yang harus didukung baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Meskipun pemerintah telah memulai program untuk mendukung Bandung sebagai <i>Smart city</i> , implementasinya akan memakan waktu lama bagi masyarakat Bandung.

3.	Anshory & Harisandi (2018)	Analisis Pengaruh Terwujudnya <i>Smart society</i> Bagi Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Situbondo http://repository.unars.ac.id/id/eprint/577/	Pemerintah daerah sebuah lembaga teknis yang erat kaitannya untuk mendukung terwujudnya <i>Smart society</i> , hal tersebut hasil perpaduan pendapat dari kelompok pemangku kepentingan yang terlibat. Aktor pertama adalah masyarakat, disusul LSM, Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian, dan terakhir masyarakat. Kualitas pelayanan publik menjadi perhatian utama..
4.	Ikhwan & Sutriadi (2016)	Adaptasi Pengembangan Komponen Ketercapaian <i>Smart city</i> (Studi Kasus Pengukuran Tingkat <i>Smart city</i> di Kota Palu) https://www.academia.edu/download/58033767/JURNAL-Smart_City_Palu.pdf	<i>Smart People, Smart Governance, Smart Economics, Smart Environment, Smart Mobility, dan Smart Living</i> merupakan komponen-komponen pencapaian <i>Smart city</i> dalam konteks pembangunan dan penyelenggaraan kota di Indonesia. Selanjutnya, komponen-komponen tersebut direduksi menjadi kriteria dan indikasi keberhasilan <i>Smart city</i> .
5.	Suhartono et al, (2019)	Analisis <i>Smart People</i> in <i>Smart city</i> (Analisis Perilaku Masyarakat Tangerang Selatan dalam mewujudkan Kota yang Cerdas https://core.ac.uk/download/pdf/337610473.pdf	Konsep <i>Smart city</i> Tangsel akan dirancang untuk membantu masyarakat mengelola sumber daya yang ada secara efisien dan memberikan informasi kepada masyarakat atau lembaga dalam menjalankan kegiatan dan memprediksi situasi yang tidak terduga. Masyarakat cerdas adalah mereka yang mampu mengembangkan sumber daya alam lingkungan kota, membangun pola mental dan perilaku konstruktif, bertoleransi terhadap keberagaman yang berkembang, serta menjaga pelayanan dan infrastruktur kota. Selain itu, masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kota, serta menjadi pengguna kota yang aktif.

6.	Sukmatama et al, (2019)	Penerapan Konsep <i>Smart city</i> pada Desain Kawasan di Cibubur https://jurnal.umj.ac.id/index.php/purwarupa/article/view/2204	Untuk membangun <i>Smart city</i> yang memenuhi harapan, penting untuk memperhatikan indikasi dasar tertentu dalam penerapan <i>Smart city</i> . Sebagai standar efektivitas penerapan <i>Smart city</i> , terdapat enam indikator utama: Smart Mobility, Smart People, Smart Living, Smart Government, Smart Environment, dan Smart Economy. Setiap indikasi berisi beberapa sub-indikator. Untuk mewujudkan <i>Smart city</i> yang sesuai dengan sub-indikasinya, perlu juga memperhatikan integrasi dan kombinasi keenam indikator di atas.
7.	Widiyastuti, (2019)	Tata Kelola Institusi, Teknologi, dan Manusia: Bagaimana Pemerintah Daerah Menangani Komponen <i>Smart city</i> https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/iptekkom/article/view/2611	Pemerintah Daerah mempunyai ambisi strategis dalam hal tata kelola dan teknologi, namun masih kekurangan sumber daya manusia. Ketidakselarasan antara tujuan pembangunan dan taktik pelaksanaan menunjukkan kurangnya pemahaman. Pemerintah daerah masih belum fasih dalam memanfaatkan tren data dan merangkul masyarakat untuk mengurus daerahnya.
8.	Radjikan & Pramesti, (2022)	Pengaruh Penerapan <i>Smart society</i> terhadap Pelayanan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/507	Implementasi aplikasi JSS memberikan pengaruh terhadap pelayanan yang terjadi di kota Yogyakarta karena pada aplikasi tersebut terdapat berbagai fitur yang telah terintegrasi. Selain itu, dalam implementasinya, aplikasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus dievaluasi oleh pemerintah kota Yogyakarta. Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat luas agar jumlah peserta semakin meningkat dan aplikasi dapat bekerja lebih maksimal.

9.	Ramadhani et al, (2020)	E-Government Assessment pada Kualitas Aplikasi Jogja Smart Service (JSS) di Kota Yogyakarta https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/1031	Aplikasi Jogja Smart Service (JSS) dinilai menjadi salah satu Aplikasi Jogja Smart Service (JSS) dinilai menjadi salah satu fasilitas pelayanan publik yang unggul.
10.	Aisyahh et al, (2020)	“ <i>Transforming Governance</i> ” di Kota Yogyakarta https://pdfs.semanticscholar.org/3575/a8547922ac692d74ee3286c4e7e1edbc57e1.pdf	Beberapa program <i>Smart city</i> yang dimanfaatkan di Yogyakarta antara lain “Jogja Smart Service” dan lain-lain. Pemanfaatan layanan publik melalui aplikasi ini sangat membantu warga dan pemerintah Kota Yogyakarta untuk menjadi <i>Smart city</i> .
11.	Gayatri & Ernady, (2022)	Kajian Pembangunan <i>Smart society</i> Kota Bandung https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSURP/article/view/2884	Rata-rata persentase kepuasan masyarakat di Kecamatan Rancasari sebesar 79,71% menunjukkan bahwa masyarakat kurang puas terhadap kinerja pemerintah dalam mewujudkan <i>Smart society</i> . Variabel kinerja rendah antara lain pengembangan manajemen pendidikan berbasis teknologi bercirikan Bandung Masagi, pengembangan sistem keamanan yang kolaboratif dan didukung teknologi, smart transportation, pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial, interaksi sosial masyarakat, smart community, bantuan sosial masyarakat yang terintegrasi TIK, peningkatan hubungan sosial masyarakat, smart education dan sistem manajemen keamanan dengan memanfaatkan Internet of Things (IoT)

12.	Kurniawan & Andiyani (2021)	<p>Disrupsi Teknologi pada Konsep <i>Smart city</i>: Analisis <i>Smart society</i> dengan Konstruksi Konsep <i>Society 5.0</i></p> <p>https://journal.inten.ac.id/index.php/archicentre/article/view/101</p>	<p>Memberikan peluang pengembangan kolaboratif antara pemerintah dan institusi pendidikan dalam mengawinkan konsep <i>Society 5.0</i> dengan Bandung <i>Smart city</i> untuk mengoptimalkan peran masyarakat dan industri dalam mendukung program pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan perkotaan yang kompleks khususnya di Kota Bandung</p>
13.	Astuti & Cahyadi (2018)	<p><i>Smart city</i> Kutai Kartanegara dengan Pendekatan Framework Citiasia: Sebuah Kajian Analisis</p> <p>https://jurnal.wicida.ac.id/index.php/sebatik/article/view/331</p>	<p>Teknik <i>framework Citiasia</i> digunakan untuk menyusun studi <i>Smart Regency</i> Kutai Kartanegara. Model Citiasia mendorong pertumbuhan nasional dengan menawarkan solusi <i>Smart city</i> yang menggabungkan model yang akurat dan kuat dengan bantuan teknologi inovatif dan ramah pengguna. <i>Smart governance, smart branding, smart economics, smart living, Smart society, dan smart environment</i> merupakan enam elemen cerdas yang akan dipelajari dan dibangun.</p>
14.	Murhadi & Jumasa (2019)	<p>Strategi Transisi Kabupaten Purworejo dari E-Government menuju <i>Smart city</i></p> <p>https://apic.id/jurnal/index.php/jsc/article/view/41</p>	<p>Rencana Kabupaten Purworejo dalam transisi dari e-Government ke <i>Smart city</i> merupakan pendekatan sistem. Garuda <i>Smart city</i> Model menjadi metode dalam mengembangkan arah kebijakan dalam visi dan tujuan dengan domain pelayanan. Setiap jalur kebijakan dikaitkan dengan smart economy, <i>Smart society</i> atau smart environment. Selain itu, ada quick win dari visi dan tujuan yang bertujuan untuk mempercepat tujuan RPJMD menjadi <i>Smart city</i>. Quick win berupa pembangunan program berbasis teknologi informasi untuk memfasilitasi transisi kabupaten Purworejo menuju <i>Smart city</i>.</p>

15.	Hasibuan & Sulaiman (2019)	<i>Smart city</i> , Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/but/article/view/1097	Penelitian tersebut bertujuan untuk mengembangkan kota pintar di Provinsi Sumatera Utara dengan fokus pada isu tata kelola pemerintahan dan lingkungan hidup. Hal ini berupaya untuk membangun kesamaan paradigma dan kerjasama antar berbagai pihak untuk memprioritaskan kota pintar sebagai layanan publik. Meskipun merupakan konsep baru dalam perencanaan tata ruang di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi masalah bagi pemerintah pusat jika proyek percontohan kota pintar dilaksanakan.
-----	----------------------------	---	--

Pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan peneliti sekarang berfokus pada implementasi kebijakan *Smart city* dengan memfokuskan pada dimensi *Smart society* pada aplikasi Bantulpedia. Aplikasi Bantulpedia belum banyak diteliti pada penelitian sebelumnya, karena Bantulpedia menjadi salah implementasi *Smart city* dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang belum lama diluncurkan. Penelitian terkait *Smart city* di Kabupaten Bantul juga masih sangat minim, maka dilakukan penelitian dengan topik tersebut.

F. Kerangka Teori

1. *Smart city*

Konsep awal *Smart city* adalah meningkatkan kualitas kota agar menjadi 'pintar' dengan cara meningkatkan infrastruktur teknologi, khususnya ICT (*Information Communication and Technology*) di wilayah tersebut, dengan mengembangkan aplikasi perangkat lunak dan melakukan kerjasama dengan pihak sektor swasta (Arafah & Winarso, 2020). Menurut Ramadhani et al, (2020) *Smart city* adalah kota yang memahami emosi dan perilaku masyarakatnya terhadap kepuasan pelayanan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan responsif dalam menanggapi ambisi masyarakatnya. Konsep *Smart city* merupakan hal yang telah menjadi isu utama di kota-kota besar di seluruh dunia, mendorong peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kota melalui pendekatan *citizen-centric*, sehingga menghasilkan interaksi yang lebih dinamis dan erat antara warga dan layanan kota dalam hal ini adalah sektor pemerintah (Murhadi & Jumasa, 2019). *Smart city* adalah kota yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk memberikan kualitas hidup yang baik yang didukung oleh keadaan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan dalam tata kelola yang partisipatif, responsif, inovatif, dan kompetitif (Ikhwan & Sutriadi, 2016).

Menurut Aisyahh et al, (2020) dikutip Cohen (2012) terdapat enam dimensi dalam *Smart city* yaitu:

i. *Smart Economy*

Smart economy adalah salah satu metode pengelolaan sektor ekonomi secara cerdas yang memiliki upaya untuk mengembagka ekosistem sektor ekonomi di tempat-tempat yang menghadapi permasalahan di era disrupsi dan memerlukan kecepatan dalam beradaptasi (Umam & Mafruhah, 2022).

ii. *Smart Mobility*

Smart mobility adalah tersedianya transportasi umum sebagai penunjang mobilitas masyarakat kota yang telah terintegrasi dengan ICT dan berkelanjutan (Safitry et al., 2020)

iii. *Smart Environment*

Smart environment adalah lingkungan yang memberikan kenyamanan dan keamanan, serta aspek keindahan atau estetika, bukan sekedar fungsi, dan dapat mengurangi polutan yang ada serta tahan terhadap perubahan suhu yang drastis (Sukmatama et al., 2019).

iv. *Smart Living*

Smart living merupakan sebuah konsep rumah yang tidak hanya berfokus pada estetika, namun juga pada kondisi pemilik dan lingkungan sekitar, serta cara pandang dan pola berpikir yang mengarah pada paradigma kebenaran, pragmatisme, dan kreativitas (Setyowati et al., 2019).

v. *Smart Government*

Smart government merupakan penerapan serangkaian proses bisnis dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menjamin kelancaran arus informasi di seluruh program dan sektor pemerintah, dengan tujuan menjadikan pemerintah lebih responsif dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada seluruh masyarakat kota (Nento et al., 2017)

vi. *Smart People*

Smart people adalah masyarakat yang mampu mengembangkan sumber daya alam lingkungan kota, membentuk pola pikir dan perilaku positif, menerima perbedaan yang semakin besar, dan menjaga sarana dan prasarana kota, serta memiliki budaya dan pemahaman yang sama dalam pemanfaatan infrastruktur pemerintahan (Suhartono et al., 2019). Dalam beberapa penelitian *smart people* juga disebut dengan istilah *Smart society*. *Smart society* dan *smart people* adalah sebuah konsep yang saling berkesinambungan dalam konsep *Smart city* tetapi memiliki fokus yang berbeda. *Smart people* mengacu pada sebuah individu, sedangkan *Smart society* mengacu pada sekumpulan individu atau disebut dengan masyarakat. *Smart society* berperan besar dalam penerapan *Smart city* karena tanpa masyarakat yang cerdas maka konsep *Smart city* akan sulit terwujud.

Menurut Astuti & Cahyadi (2018) *Smart society* merupakan sebuah cita-cita dimana terdapat interaksi komunitas dalam koleksi individu, sosial, dan digital, dimana setiap individu dalam masyarakat harus

memiliki akses terhadap pendidikan yang didukung oleh fasilitas pembelajaran digital, dan dimana pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin keselamatan masyarakat dalam hal risiko jiwa, harta benda, dan bencana. *Smart society* adalah jenis masyarakat canggih yang muncul setelah masyarakat agraris, masyarakat industri, dan masyarakat informasi, dengan teknologi pemrosesan data digital sebagai pembawa utamanya (Chen et al., 2023). Penerapan *Smart society* dapat diartikan dengan tersedianya akses manusia terhadap internet, jaringan yang memadai, transmisi yang tinggi, partisipasi masyarakat yang tinggi, kreativitas, berkurangnya angka kejahatan, dan tingkat kepedulian yang tinggi terhadap fasilitas umum.

Dalam penelitian Gayatri & Ernady (2022) *Smart society* terbagi atas tiga indikator yaitu *community* (komunitas warga), *learning* (ekosistem pembelajaran) dan *security* (sistem keamanan).

Menurut MCMilla dan Chavis (1986) komunitas merupakan kumpulan dari para anggotanya yang memiliki rasa saling memiliki, terikat di antara satu dan lainnya dan percaya bahwa kebutuhan para anggota akan terpenuhi selama para anggota berkomitmen untuk terus bersama-sama (BINUS, 2017). *Learning* (ekosistem pembelajaran) Dalam kutipan pada artikel BINUS (2021) merupakan organisasi pembelajaran dan pengembangan yang terdiri dari manusia, teknologi, dan sumber daya yang ikut serta dalam proses pembelajaran. Kondisi ekosistem pembelajaran dipengaruhi oleh teknologi, sumber daya, dan

kebijakan pendidikan yang saling berdampak pada keadaan ekologi pembelajaran. Dalam konsep *Smart city, security* atau sistem keamanan adalah teknik dan kebijakan yang digunakan untuk mencegah dan memantau akses jaringan dan sistem informasi ilegal, penyalahgunaan, dan serangan siber (Cloudmatika, 2022)

2. Implementasi

Menurut Mursalim (2017) dalam Agustino (2006:138) pada bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Kebijakan Publik” yaitu:

“Implementasi adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dengan kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.”

Implementasi ini merupakan upaya penelitian yang mengkaji bidang kajian kebijakan dan mendalami langkah-langkah yang dilakukan dalam implementasi suatu kebijakan (Nurdiassa et al., 2021). Menurut Linberry pada Solichin (2015) Implementasi mencakup empat komponen yaitu: Pembentukan dan perekrutan personel untuk organisasi guna melaksanakan kebijakan baru; Merancang pedoman kerja bagi mereka yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan; Koordinasi alokasi sumber daya agen dan keuangan untuk kelompok sasaran tertentu; dan Mengerahkan sumber daya secara strategis untuk mencapai hasil kebijakan yang diinginkan.

3. Kebijakan

Menurut Solichin (2015) dalam Sudiyono dan Mada Ustapa (2011), Kebijakan adalah serangkaian kegiatan perencanaan dan perumusan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau badan/lembaga pemerintah untuk mengatasi suatu permasalahan dalam bentuk peraturan atau program. Lingkungan kebijakan merupakan konteks unik dimana peristiwa seputar isu kebijakan terjadi, berdampak, dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan, melibatkan proses dialektis, yang menyiratkan bahwa unsur obyektif dan subyektif pembuat kebijakan tidak dapat dipisahkan dalam praktiknya (Solichin, 2015).

Landasan utama suatu kebijakan adalah pertimbangan rasionalitas, walaupun suatu kebijakan tidak semata-mata bersumber dari perenungan nalar manusia, namun nalar manusia berperan penting dalam memilih di antara beberapa kemungkinan sepanjang proses pengambilan keputusan kebijakan (Solichin, 2015).

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan langkah penting dalam struktur kebijakan karena besarnya keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai suatu tujuan dapat mempengaruhi keseluruhan proses kebijakan (Nurdiassa et al., 2021). Implementasi kebijakan adalah suatu proses panjang di mana aktor kebijakan melaksanakan dan berpartisipasi dalam implementasi keputusan kebijakan, dengan seluruh aktivitas pemangku kepentingan ditujukan untuk mencapai tujuan kebijakan (Solichin, 2015). Menurut Mursalim (2017),

Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam struktur kebijakan karena mempengaruhi besar kecilnya keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan, salah satunya adalah implementasi.

Menurut Mursalim (2017) dalam buku “Pengantar Ilmu Administrasi Negara (Suatu Pokok Bahasan)” yang ditulis Zenju (1996:45) adalah

“Implementasi kebijakan ialah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara efektif. Kesulitan yang timbul pada tahap ini adalah sukarnya menentukan hasil kebijakan, karena adanya dampak yang tidak terantisipasi sebelumnya.”

Implementasi kebijakan didefinisikan oleh Van Meter dan Van Horn sebagai keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh individu (pejabat), pemerintah atau organisasi swasta untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan (Solichin, 2015).

Model Implementasi kebijakan dikemukakan berbagai ahli. Model Edward III dikemukakan oleh George C Edward dalam Mursalim (2017) yang bersifat top down yang populer dengan “*direct and indirect impact on implementation*”, dimana terdapat empat komponen yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan publik, yaitu Komunikasi (*Communication*) merupakan satu-satunya cara agar informasi dapat diketahui oleh pengambil kebijakan, karena komunikasi merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik; Sumber Daya (*Resources*) menjadi indikator penting dalam proses implementasi kebijakan, karena sumber daya adalah syarat berjalannya suatu tatanan organisasi; Disposisi

adalah sikap penerimaan atau penolakan dari para pelaksana kebijakan banyak mempengaruhi keberhasilan kinerja implementasi kebijakan publik (Mursalim, 2017); dan Birokrasi adalah pihak yang menjadi pemeran utama dalam proses implementasi kebijakan, karena birokrasi tidak hanya sekedar sebagai unsur pemerintah tetapi memiliki keterkaitan dengan swasta dan pihak lainnya.

Model implementasi kebijakan juga dikemukakan oleh Charles Jones dalam (Aneta, 2010) dengan menitikberatkan pada tiga aktivitas yaitu: Organisasi; Interpretasi; dan Aplikasi. Model implementasi kebijakan juga dikemukakan oleh Jan Merse dalam Aneta (2010), dimana Model implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor yaitu: Informasi; Isi kebijakan; Dukungan masyarakat; dan Pembagian potensi. Dukungan masyarakat khususnya sangat erat kaitannya dengan keterlibatan masyarakat sebagai pemangku kepentingan dalam proses pelaksanaan program.

G. Definisi Konseptual

1. *Smart city* adalah kota yang cerdas yang berbasis teknologi informasi dalam pembangunan kota agar masyarakat dapat mendapatkan pelayanan publik secara efektif dan efisien.
2. *Smart society* adalah masyarakat cerdas yang tinggal didalam sebuah kota yang memanfaatkan teknologi dan informasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal pelayanan publik dan kebijakan publik.

3. Implementasi adalah pelaksanaan suatu kegiatan program yang telah dirancang untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai
4. Kebijakan adalah Suatu ketentuan yang mencakup prinsip-prinsip panduan untuk tindakan yang disengaja dan konsisten yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu.
5. Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan terhadap peraturan dan keputusan yang disepakati untuk mencapai suatu tujuan.

H. Definisi Operasional

Indikator-indikator yang digunakan untuk penilaian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1 2. Definisi Operasional

No	Indikator	Variabel	Parameter
1.	<i>Smart society</i>	<i>Community</i>	Tempat
		<i>Learning</i>	Manusia Teknologi
		<i>Security</i>	Kebijakan pencegahan
2.	Implementasi Kebijakan	<i>Communication</i>	Kejelasan
		<i>Resources (Sumberdaya)</i>	Kewenangan
		Disposisi	Kecenderungan
		Birokrasi	<i>Standard Operational Procedure (SOP)</i>

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, kata-kata tertulis atau lisan, dan perilaku yang dapat diamati, berbeda dengan

kebanyakan bentuk penelitian lainnya, penelitian kualitatif bersifat terbuka dan induktif (Taylor & Bogdan, 1989). Sedangkan menurut Barlian (2016), Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupaya memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara holistik dan melalui uraian dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks yang spesifik, alami, dan melalui penggunaan berbagai metode alami. Penelitian kualitatif berupaya mendapatkan pengetahuan menyeluruh tentang permasalahan manusia dan masyarakat, bukan sekedar mendeskripsikan permukaan realitas (Fadli, 2021). Bantulpedia menjadi objek dalam penelitian ini, dengan mendeskripsikan hasil dari implementasi kebijakan yang berkaitan dengan dimensi-dimensi dari *Smart society*.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul menjadi subjek penelitian. Alasan dilakukan penelitian di wilayah Kabupaten Bantul karena Bantulpedia merupakan aplikasi dari Pemkab Bantul atau Diskominfo Bantul. Selain itu, lokasi yang strategis mudah dijangkau sehingga penulis dapat melakukan penelitian secara lebih efektif dan efisien.

3. Jenis Data Penelitian

i. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung yang berasal dari narasumber/sampel/responden (Barlian, 2016). Dengan kata lain data primer diperoleh dari sumber pertama. Penggunaan data primer biasanya dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menghasilkan informasi yang mencerminkan kebenaran secara akurat dan sesuai dengan kondisi faktual, sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Pramiyati et al., 2017). Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan wawancara langsung dengan Dinas Kominfo Kabupaten Bantul selaku penanggungjawab aplikasi Bantulpedia. Melalui data primer, peneliti dapat mendapat informasi yang lebih tepat dan dapat dipertanggungjawabkan karena berasal dari sumber pertama.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung atau melalui pihak lain (Barlian, 2016). Informasi yang telah didapatkan sebelum penelitian dilakukan atau telah dikumpulkan oleh peneliti sebelumnya. Data sekunder pada penelitian ini berasal dari website, buku, jurnal, dan berbagai penelitian sebelumnya. Selain itu, juga berasal dari laporan kerja dan arsip dari Dinas Kominfo Kabupaten Bantul. Data sekunder dapat digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih

komprehensif dan representatif sekaligus menghemat waktu dan uang dalam perolehan data.

ii. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber informasi yang digunakan dalam penelitian untuk mendukung atau memperkuat hipotesis atau tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian adalah topik yang dapat diperoleh datanya (Barlian, 2016). Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari berbagai sumber terdahulu seperti dalam jurnal, artikel, website, dan buku yang memiliki kesamaan topik penelitian. Selain itu, peneliti juga mendapatkan sumber data dari lapangan yaitu dari Dinas Kominfo Bantul selaku penanggung jawab Bantulpedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2005) dalam teknik pengumpulan data terdapat teknik triangulasi data. Triangulasi merupakan strategi penggabungan teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah digunakan. Dalam teknik triangulasi terbagi menjadi tiga jenis, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Pada penelitian ini, jenis yang digunakan adalah triangulasi teknik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

- i. Observasi adalah kegiatan pengamatan langsung yang dilakukan peneliti sambil mengumpulkan data dan ikut serta dalam kegiatan yang diselidiki (Barlian, 2016). Observasi akan dilakukan di lingkungan kantor Dinas Kominfo Bantul.

- ii. Wawancara adalah dialog yang bertujuan dan didahului dengan berbagai pertanyaan informal yang cenderung mengarahkan wawancara untuk mengetahui perasaan, persepsi, dan pemikiran partisipan (Rachmawati, 2007). Wawancara dilakukan dengan narasumber dari pihak Dinas Kominfo Kabupaten Bantul yang memiliki wewenang dalam kaitan dengan Bantulpedia. Selain itu, juga dilakukan wawancara dengan pengguna Bantulpedia untuk menyelaraskan data dan informasi dari Dinas Kominfo Kabupaten Bantul.
- iii. Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumentasi seperti catatan, foto, dan video (Barlian, 2016). Dokumentasi dilakukan untuk mendokumentasikan berbagai laporan dan dokumen yang dimiliki Dinas Kominfo Bantul yang berkaitan dengan Bantulpedia. Selain itu, juga mendokumentasikan penggunaan Bantulpedia secara umum.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah pengumpulan data interaktif, yang memungkinkan data dianalisis dan disimpulkan sebelum diklasifikasi ke dalam unit ide, kategori, dan tema tertentu (Rijali, 2019). Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, dimana fokus utama berada pada penjelasan sebab dan akibat dari topik penelitian. Menurut Miles & Huberman (1992) terdapat tiga alur teknik analisis data yaitu:

- i. Reduksi data

Reduksi data meliputi merangkum, memilih poin-poin utama, memfokuskan pada poin-poin yang paling signifikan, mencari tema dan

pola, dan membuang item-item yang dianggap mubazir. Artinya data yang telah diproses akan menyajikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti memperoleh data tambahan dan melakukan pencarian kembali bila diperlukan (Fadli, 2021). Teknologi elektronik juga dapat membantu reduksi data dengan memfasilitasi beberapa komponen proses reduksi data.

ii. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data adalah tahap setelah reduksi data, dimana berupa mendeskripsikan atau menarasikan data sesuai dengan hubungan atau kategori data. Artinya narasi merupakan format yang paling umum digunakan untuk menyajikan hasil penelitian kualitatif (Fadli, 2021). Tujuan penyajian data adalah untuk memudahkan memahami apa yang sedang terjadi. Jika teori selalu didukung oleh bukti lapangan, maka teori tersebut akan menjadi beralasan. Ide ini dikembangkan secara induktif, berdasarkan bukti lapangan, dan diuji melalui pengumpulan data secara terus-menerus.

iii. Menarik kesimpulan

Tahap terakhir dalam alur ini adalah menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan adalah menyusun data-data yang telah diolah dengan secara singkat dan jelas sesuai dengan hasil yang ada. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat atau tidak dapat menjawab rumusan masalah sejak awal, karena seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa permasalahan dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih

bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian dilakukan di lapangan (Fadli, 2021). Namun temuan penelitian kualitatif diharapkan dapat menghasilkan temuan yang sebelumnya tidak diketahui.